BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lingkungan laut sebagai perwujudan suatu bagian (aspek) dari lingkungan hidup di atas bumi, dewasa ini memperlihatkan perkembangan baru. Manfaat laut bukan lagi sekedar tempat menangkap ikan, penghasil garam, kegunaan pelayaran, atau tempat rekreasi. Namun, di dalam perkembangannya saat ini mengarah pada hasil mineral di dasar laut, dan barengi pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju pesat manfaat laut semakin besar. Lebih jauh lagi, bahkan manfaat laut itu telah berkembang menjadi tempat pemukiman bagi umat manusia yang masa ini telah mulai diperkirakan oleh para ahli ilmu pengetahuan. Sehingga kebinekaan guna laut bagi manusia, dapat digolongkan antara lain sebagai sarana pelayaran, tempat kegiatan hiburan, pertambangan dan pertahanan keamanan. Kesemuanya itu diwujudkan oleh manusia lewat pandangan maupun perhatian yang selalu berubah.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain berdampak positif namun juga memiliki dampak negatif, hal ini terjadi apabila manusia dengan perkembangan yang ada hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan lingkungan yang di sekitarnya. Aktifitas yang dilakukan di laut tentunya akan memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan laut itu sendiri, baik terhadap biota laut maupun terhadap manusia yang hidup atau

¹Arifin Siregar, *Hukum Pencemaran Laut Di Selat Malaka, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum USU, 1996, hlm. 22.*

bertempat tinggal dipinggiran pantai. Laut yang merupakan jalur transportasi dari daerah yang satu ke daerah yang lain maupun antar Negara tentu memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dan kontrol dan pemerintah terhadap setiap aktifitas yang dilakukan di laut, dengan tujuan menjaga lingkungan laut dari pencemaran atau perusakan. Namun tidak dapat dipungkiri sering terjadi pencemaran ataupun perusakan lingkungan laut baik sengaja maupun tidak disengaja terjadi, salah satunya adalah terjadinya pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal akibat kebocoran, dibuang secara sengaja dan lain sebagainya.

Mengingat peran laut yang sangat strategis karena sebagian masyarakat mengandalkan laut sebagai mata pencaharian dan hidupnya, laut perlu mendapat perhatian utama dalam penegakkan hukumnya terutama dari akibat kerusakan ekosistem karena pencemaran. Sumber pencemaran laut dapat berasal dari:

- 1) pencemaran yang disebabkan atau berasal dari kapal;
- 2) pencemaran yang berasal oleh instalasi pengeboran minyak;
- 3) sumber pencemaran di darat; dan
- 4) pencemaran melalui udara.

Perkembangan kehidupan dan mobilitas penduduk berakibat pada rusaknya dan tercemarnya lingkungan hidup. Masalah pencemaran terhadap lingkungan hidup termasuk pencemaran laut yang terjadi, telah memicu dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang Undang Dasar 1945). Pembentuk amandemem

Undang Undang Dasar 1945 berusaha memasukan isu lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sebagai wujud dari perlindungan terhadap lingkungan hidup sekaligus juga perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya rumusan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masuk dalam rumusan Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan rumusan pasal tersebut sebagai norma dasar hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.² Dengan demikian lingkungan hidup dan manusia wajib mendapatkan perlindungan dari kerusakan maupun pencemaran. Penjabaran dari Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 adalah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan pencemaran minyak di laut karena kecelakaan kapal (tanker) di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius berkenaan dengan hak menggugat (*ius standi*), pembuktian yang terkait dengan verifikasi ilmiah untuk menjelaskan hubungan kausal, penerapan asas ganti kerugian, cakupan dan luas isu lingkungan untuk menetapkan jumlah ganti rugi, dan kriteria pemulihan lingkungan terkait dengan sistem kebenaran formil yang dianut dalam sistem penuntutan ganti kerugian secara perdata.

Masalah perlindungan lingkungan laut ini berkaitan dengan hal pencemaran karena tumpahan minyak sudah diatur sejak dirumuskannya

² Sodikin, "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 106, (2012)

“Konvensi Jenewa 1958” yang mengatur tentang peraturan atau rezim laut lepas. Ketentuan perundang-undangan dengan acuan Konvensi terkait upaya yang dapat memicu terjadinya pencemaran laut akibat pemanfaatan serta mengeksplorasi sumber daya laut dan disekitarnya bisa dibuat oleh tiap negara secara tegas untuk mencegah minyak yang berasal dari pipa bawah laut maupun dari kapal tanker.

Kapal sebagai transportasi pengangkutan memiliki peran penting pada kegiatan ekonomi khususnya dalam perdagangan nasional ataupun internasional. Pentingnya pengangkutan tersebut tergambar pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan barang di dalam negeri, serta dari dan ke luar negeri. Di samping itu, pengangkutan juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan. Dalam hal pengangkutan melalui laut, digunakan sarana atau alat transportasi dengan menggunakan kapal laut untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya dalam memindahkan muatan berupa barang dan maupun orang. Kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu.

Menurut Pasal 468 KUHD, “Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak Pemberi Jasa Pengangkutan atau Pemilik Kapal (*Shipowner*) dengan Pemakai Jasa atau Penyewa (*Charters*). Dengan adanya perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi

Pemberi Jasa Pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan.³

Adanya aktifitas pengangkutan dari kapal tersebut maka ada kemungkinan terjadinya kerugian baik itu kepada Penumpang, Pencarter dan bahkan Awak Kapal itu sendiri. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh karena terjadinya kecelakaan kapal, Kecelakaan kapal tersebut dapat berupa Kapal Tenggelam, Kapal Terbakar, Kapal Tubrukan, dan Kapal Kandas. Namun timbul suatu pertanyaan bagaimana dengan hal kondisi dimana kapal mengalami Kebocoran, tidak menutup kemungkinan kebocoran terjadi sehingga menimbulkan kerugian pada berbagai pihak. Bahkan yang paling dikhawatirkan adalah apabila sampai muatan yang dibawa kapal tersebut sampai tumpah dan menimbulkan pencemaran lingkungan laut. Selain itu terkadang para awak kapal juga membuang limbah air yang sudah tercampur minyak ke laut, yang seharusnya melalui proses pemisahan minyak dan air dengan menggunakan mesin *Oil Water Separator* (OSW), hal ini sering terjadi karena dilakukan di tengah laut dimana jauh dari pengawasan instansi terkait.

Peristiwa pencemaran di perairan atas tumpahan minyak lebih sering terjadi dibanding pencemaran yang terjadi di darat, pencemaran minyak saat ini semakin sering terjadi seiring dengan peningkatan permintaan minyak dunia terhadap industri yang harus diangkut dari sumbernya yang cukup jauh. Juga seiring dengan peningkatan jumlah anjungan-anjungan pengeboran minyak lepas pantai, serta akibat peningkatan kuantitas transportasi laut.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 468

Dampak tumpahan minyak dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut yang teramat besar. Kerusakan sebagai akibat tumpahan minyak selain berupa kerugian langsung terhadap ekonomi dan sosial masyarakat juga berupa kerugian jangka panjang, terutama terhadap lingkungan laut, yang baru dapat diketahui setelah sekian lama terjadinya tumpahan minyak.⁴

Untuk itu perlu segera dilakukan penanggulangan agar minyak dapat secepatnya dibersihkan, dilokalisir dan dimusnahkan sehingga kerusakan yang lebih besar dapat dicegah.⁵ Masyarakat yang berada di sekitar pantai yang tercemar perlu mendapatkan ganti rugi secepatnya, serta kerusakan ekosistem laut harus segera dilakukan *recovery* dan mengembalikan lingkungan ke keadaan sebelum terjadinya tumpahan.

Jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kecelakaan Kapal di Indonesia saat ini masih belum memasukan atau menyebutkan kebocoran kapal sebagai suatu kecelakaan kapal. Padahal dilihat memiliki dampak yang besar. Seharusnya Kebocoran Kapal dan juga kesengajaan pembuangan limbah air bercampur minyak oleh awak kapal dapat dimasukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaanya tersebut. Bahkan pada regulasi secara Internasional sudah menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban yang dapat dilakukan ketika kapal mengalami kebocoran mengakibatkan pencemaran yaitu pada Pasal 192 *United*

⁴ Kiran R dan Banu Krishna, *Liability and Compensation for Oil Pollution Damage: an Examination of IMO Convention*, IMOC, 2010, hlm. 31.

⁵ Mason, Michael, *Transnational Compensation for Oil Pollution Damage: Examining Changing Spatialities of Environmental Liability*, Department of Geography and Environment, London, 2010, hlm. 12.

Nations Convention on the Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982), menyatakan bahwa, “Setiap negara harus menjaga lingkungan laut, yang berarti memberikan penekanan bahwa ekosistem laut merupakan bagian yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh setiap negara”. Konvensi tersebut juga mengatur penyelesaian berupa pertanggungjawaban dan ganti kerugian atas pencemaran tersebut. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan laut diatur dalam ketentuan Pasal 235 UNCLOS 1982.⁶

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari adanya kebocoran kapal ini cukup besar baik pada kerugian yang timbul dan juga kepada para pihak yang terlibat. Maka timbul pertanyaan prinsip pertanggungjawaban apa yang tepat digunakan dalam hal pertanggungjawaban Pengusaha Kapal dalam pengangkutan laut terhadap timbulnya kebocoran kapal.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan secara geografis sangat strategis sebagai jalur perlintasan kapal dan karenanya sangat rentan terhadap bahaya tumpahan minyak terutama dari kapal. Dari beberapa peristiwa tumpahan minyak yang telah terjadi telah menimbulkan dampak kerusakan yang sangat parah. Sementara terdapat kendala untuk mendapatkan ganti rugi bagi penanggulangan yang dilakukan baik terhadap pemulihan hak masyarakat yang menderita kerugian maupun pemulihan lingkungan yang rusak.

Sumber utama pencemaran laut biasanya berasal dari tumpahan minyak yang bersumber dari kegiatan operasional kapal, pengeboran lepas pantai

⁶ Novia Kusuma Ningsih, 2016, “*Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional*”, Jurnal Hukum, Vol. 3, No.1, hlm. 2, (2016)

(eksplorasi) maupun akibat kecelakaan kapal. Setiap tahunnya 3 sampai 4 juta ton minyak bumi mencemari lingkungan laut. Pencemaran minyak bumi yang disebabkan oleh kapal umumnya disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal, baik yang berasal dari tangki bahan bakar kapal itu sendiri atau tumpahan minyak dari kapal akibat proses pembuangan minyak kotor yang terdapat di dalam kamar mesin maupun minyak sebagai kargo (muatan).⁷ Sumber pencemaran laut yang bersumber dari kapal diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu kegiatan operasi kapal, pembuangan secara sengaja (*dumping*), kegiatan di dasar laut dan kegiatan di darat.

Kasus pencemaran minyak yang terjadi di Indonesia diantaranya, pencemaran lingkungan laut yang terdampak dari kegiatan transportasi laut adalah Banten Selatan, karena wilayah ini ramai dilalui oleh kapal dan barge atau tongkang. Kondisi geografis wilayah ini sangat ramai dilalui moda laut sehingga rawan dan cuaca yang kurang mendukung sehingga dapat terjadi tubrukan dan kandasnya kapal, Pencemaran laut dengan tumpahnya minyak di perairan sekitar Kepulauan Karimata yang berisiko menyebabkan terganggunya biota laut dan mengancam kerusakan karang akibat hempasan badan tongkang (yang terbalik). Terlebih wilayah laut tempat tumpahnya material karnel sawit berada dalam kawasan cagar alam laut (Senin, 13/2/2022), Sejak 12 Juli 2019, sumur minyak Pertamina di Karawang, bocor hingga minyak tumpah mencemari lingkungan sekitar. Tak kurang, 12 (dua belas) desa di Karawang dan Bekasi serta tujuh pulau di Kepulauan Seribu, terdampak tumpahan minyak, seperti Pulau Air, Pulau

⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001, hlm. 261.

Untung Jawa, Bidadari, Lancang, Pulau Rambut, Pulau Damar dan hal serupa terjadi di Balikpapan, Banjarmasin dan Batam (2018).

Tumpahan minyak (*oil spill*) merupakan bencana atau kejadian yang sangat membahayakan baik bagi awak kapal, perusahaan, masyarakat nelayan dan yang paling merugikan terhadap alam itu sendiri terutama ekosistem laut, dalam hal ini perlu ribuan tahun untuk memulihkan kondisi ekosistem laut tersebut. Permasalahan pencemaran minyak dipantai menjadi sedemikian latent di Indonesia mengingat karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dari daratan serta banyaknya kasus pencemaran minyak di Indonesia disebabkan beberapa wilayah pantai Indonesia secara geografis potensial pencemaran, karena karakteristik tertentu yaitu, memiliki Pelabuhan dan Badan Usaha Milik Negara untuk Pengolahan Minyak.

Sampai saat ini masalah pencemaran belum dapat terselesaikan dengan baik bahkan pemberitaan mengenai sumber pencemar sulit untuk diakses oleh pemerintah dan masyarakat. Negara sebagai pelaksana kegiatan perlindungan lingkungan laut dan fasilitas pendukungnya seharusnya memiliki instrumen hukum untuk mengklaim ganti rugi dan restitusi bagi pelaku dan penanggung jawab usaha. Pencemaran minyak di laut baik oleh kapal tanker, kapal penumpang, kapal barang akan menjadi perhatian serius karena pencemaran menimbulkan kerugian yang serius bagi ekologi laut dan masyarakat yang tinggal dipinggiran pantai. Sebuah argumentasi diberikan oleh John Maddox, pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul (*price*), pencemaran merupakan masalah ekonomi, “*we can reduce pollution if we are*

prepared to pay it”, sehingga harus dipahami bahwa masalah pencemaran adalah persoalan ekonomi, artinya berapa kemampuan kita membayarnya baik dengan menciptakan alat pencegah pencemaran *anti-pollution* maupun secara tidak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran. *changes can solve many environmental problem*. Menurutnya, pencemaran dapat dikendalikan secara ekonomis melalui pengaturan hukum seperti penerapan denda, pajak pada bahan yang diproses atau limbahnya.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, **“Pertanggung Jawaban Perusahaan Pemilik Kapal Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Tumpahan Minyak Muatan Kapal Di Laut Di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah tanggungjawab perusahaan pemilik kapal terhadap tumpahan minyak dilaut yang mengakibatkan pencemaran di laut ?
2. Bagaimana sinergitas perusahaan pemilik kapal dan pemerintah dalam menangani masalah pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak di laut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

⁸ Rangkuti dan Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 22.

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah di tulis, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perusahaan pemilik kapal terhadap tumpahan minyak dilaut yang mengakibatkan pencemaran di laut.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis sinergitas perusahaan pemilik kapal dan pemerintah dalam menangani masalah pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum khususnya bidang lingkungan, Hukum Perdata dan Hukum Dagang berkaitan dengan tanggung jawab akibat perbuatan yang merugikan pihak lain.
- b. Untuk dapat menjadi bahan pembaharuan terhadap penegakan hukum lingkungan bagi pelaku pencemaran laut.

2. Secara Praktis

Untuk menjadi bahan masukan bagi Pemerintah, Pengusaha dalam hal ini pemilik kapal, dan masyarakat dalam menangani, mengawasi dan mengontrol setiap aktifitas di laut yang dapat atau yang diduga dapat mengakibatkan pencemaran dilaut.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis merupakan proposisi yang akan mengemukakan pandangan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti serta penghubung antara masalah yang diteliti dengan cara yang dimungkinkan untuk memiliki visi yang lengkap terhadap masalah yang akan diteliti dengan ini maka teori yang akan digunakan memiliki fungsi untuk mengkaji serta menganalisis norma-norma ataupun aturan-aturan perundang-undangan serta keputusan pengadilan maupun doktrin yang akan menjadi topik permasalahan.⁹

Teori Hukum digunakan sebagai pisau bedah atau sebagai dasar dalam pertimbangan jawaban dalam permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

a. Teori Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Berdasarkan definisi dari OECD, 2001 yang dimaksud dengan *polluter pays principle* itu sendiri merupakan sebuah prinsip yang mengharuskan bagi pencemar untuk menanggung sejumlah biaya atas tindakan yang dilakukan untuk dapat mengurangi polusi sesuai dengan tingkat kerusakan yang telah ditimbulkan pada masyarakat atau bahkan yang melebihi tingkat atau standar polusi yang dapat diterima.

Sedangkan definisi dari Siswanto, mengenai *polluter pays principle* dapat dikatakan bahwa bagi setiap orang yang dalam rangka

⁹ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 7.

melakukan kegiatannya dapat berpotensi menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan, maka diharuskan memikul biaya pencegahan (preventive) atau biaya penanggulangan (restorative).

Polluter pays principle ini pada dasarnya berkaitan erat dengan lingkungan. Pada awal tahun 1972, *polluter pays principle* ini mulai dianut oleh negara-negara yang merupakan anggota dari OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*). Setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun mengenai *the polluter pays principle*, maka menghasilkan sebuah rekomendasi OECD Council pada 26 Mei 1972 mengenai *Guiding Principles Concerning the international economics aspects of environmental policies* yang telah diterima oleh pemerintah dari masing-masing negara anggota, yaitu berupa penerapan antara lain *the polluter pays principle* dan juga rekomendasi mengenai penyesuaian dari norma-norma yang bersangkutan atau berkaitan, yaitu yang memiliki pengaruh ekonomi internasional dan juga lalu lintas perdagangan.

Jadi, pada awal tahun 1972 *polluter pays principle* ini mulai dianut oleh negara-negara yang merupakan anggota dari OECD yang pada intinya menyebutkan bahwa seorang pencemar harus membayarkan sejumlah biaya pencegahan dan juga penanggulangan pencemaran yang telah ditimbulkannya.

Secara sederhana, pengertian dari *polluter pays principle* atau yang juga dikenal dengan sebutan prinsip pencemar membayar dapat

diartikan bahwa setiap pelaku kegiatan atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran, maka harus membayarkan biaya atas dampak pencemaran yang ditimbulkannya.

Polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar ini pada dasarnya lebih menekankan pada segi ekonomi dibandingkan segi hukum, karena prinsip ini mengatur mengenai kebijaksanaan atas penghitungan nilai dari kerusakan lingkungan serta pembebanan sebagai upaya untuk memulihkan lingkungan yang rusak.¹⁰

Berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pencemar, biaya yang digunakan untuk mencegah dan mengendalikan polusi tersebut harus tercermin pada harga barang dan juga jasa yang dapat menyebabkan pencemaran selama proses produksi atau proses konsumsinya (OECD, 2008).

Tujuan utama dari prinsip ini, yaitu untuk dapat menginternalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu prinsip yang merupakan pangkal atas tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini bermakna bahwa sejatinya pencemar harus bertanggung jawab untuk dapat menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang telah ditimbulkannya (Syarif dan Wibisana, 2000).

Polluter pays principle ini dapat juga diterapkan melalui berbagai macam cara, mulai dari standar proses dan produk yang telah ditetapkan sebelumnya, hingga dengan cara menarik pungutan. Salah

¹⁰ Rangkuti, *Op.Cit.*, hlm. 244.

satu instrumen yang dapat digunakan adalah dengan mengenakan atau membebankan pajak pada pencemar yang dimana jumlahnya setara dengan nilai kerusakan yang ditimbulkannya.

b. Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Schuld Aansprakelijkheid /Liability Based On Faul*) dan Tanggung Jawab Seketika (*Strict Liability*)

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar dan/atau merusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata kita yang menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*schuld aansprakelijkheid atau liability based on fault*), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyatakan bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Asas tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan didasarkan pada adagium bahwa tidak ada tanggung jawab apabila tidak terdapat unsur kesalahan (*no liability without fault*). Tanggung jawab demikian, disebut pula dengan “*tortious liability*”. Pada umumnya ketentuan ganti kerugian ini

mempunyai tujuan, Untuk pemulihan keadaan semula akibat tindakan tersebut yaitu:

1. Untuk pemenuhan hak seseorang, di mana suatu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa seseorang berhak atas suatu ganti kerugian apabila telah terjadi sesuatu yang dilarang;
2. Ganti kerugian sebagai sanksi hukum; dan
3. Sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, dalam arti bahwa undang-undang tidak merumuskannya sebagai hak seseorang, namun undang-undang menyatakannya sebagai kewajiban.

Teori tersebut juga dianut di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang Undang Nomor 32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) mengamanatkan adanya perintah ganti rugi atau melaksanakan perbuatan lainnya guna memulihkan lingkungan yang rusak atau tercemar. Kedua konsep tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab seketika (*strict liability*) yang dianut dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 88 Undang Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan

hidup yang bersifat khusus, yaitu tanggung jawab mutlak. Berdasarkan Penjelasan Pasal 88 Undang Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Menurut Arnold H. Loewy, dalam buku Criminal Law memberi keterangan tentang strict liability sebagai berikut: “*Strict liability occurs when a conviction can be obtained merely upon proof that defendant perpetrated an act forbidden by statute and when proof by defendant that the utmost of care to prevent the act would be no defence.* (Tanggung jawab mutlak diterapkan tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan jika dibuktikan oleh terdakwa bahwa ia telah melakukan segala usaha untuk mencegah perbuatan, tidaklah merupakan pembelaan)”.

2. Kerangka Konsep

a. Lingkungan

Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil.¹¹

Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Lingkungan memberi sumber-sumber kehidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri, tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan

¹¹ A. Rusdina, *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab*, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 2, hlm. 247, (2015)

tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri.¹²

Indonesia merupakan negara maritim sehingga pengangkutan laut mempunyai peranan yang penting dalam menghubungkan kepulauan Nusantara dan menggerakkan perekonomian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UNDANG UNDANG DASAR 1945), merefleksikan negara kesatuan dari seluruh pulau yang ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita harus bangga visionernya Mr. Djuanda dalam Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu adalah Djuanda Kartawidjaja, deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Indonesia secara berkesinambungan memandang perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPPLH), Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

¹² Yosef Anata Christie (*et.al.*), *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City oleh PT Kusuma Hady Property)*, Jurnal Beraja Niti, Vol. 2, No. 11, hlm. 248-249, (2013)

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pencemaran laut sebagai kejadian yang tidak dikehendaki oleh manusia terutama bagi orang-orang yang kehidupannya bersumber dari laut. Sekalipun pencemaran laut ini tidak dikehendaki pencemaran laut akibat dari kapal merupakan peristiwa yang tidak terelakkan (*inevitable phenomenon*).

b. Pencemaran

Pencemaran menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1988 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air / udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

c. Pencemaran Lingkungan Laut

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya

kesalahan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain.

Penegakan hukum pencemaran lingkungan biasanya diselesaikan melalui instrumen perdata, khususnya di Indonesia kurang disenangi disebabkan karena berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Hampir semua kasus perdata pada akhirnya di lempar pula ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi, karena selalu tidak puasnya para pihak yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan segala upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa terus pula ke Peninjauan Kembali. Sesudah ada putusan kasasi pun masih juga sering sulit sekali putusan itu dilaksanakan. Penegakan hukum lingkungan akan menjadi titik silang penggunaan instrumen hukum perdata (kaitannya dengan hak dan kewajiban, pertanggungjawaban, ganti kerugian, perbuatan melanggar hukum, dan kontrak hukum). Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat.

d. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-

apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Sedangkan pertanggung jawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab sesuatu yang di pertanggung jawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³

Disebutkan juga bahwa pertanggung jawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹⁴ Tangung jawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.¹⁵ Tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban

¹³ Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 34.

¹⁴ Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 21.

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, hlm 12.

kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi. Disebutkan juga bahwa pertanggung jawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

e. Kapal Laut

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, dan energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah. Menurut Bambang Triadmodjo definisi kapal adalah, panjang lebar dan sarat (*draft*) kapal yang akan menggunakan pelabuhan berhubungan langsung pada perencanaan pelabuhan dan fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pelabuhan.¹⁶

f. Pemilik Kapal

¹⁶ Bambang Triadmodjo, *Perencanaan Pelabuhan*, Ed. Pertama, Beta Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

Pemilik Kapal adalah orang perseorangan atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim).

Menurut Pasal 1320 KUHD, Pengusaha Kapal adalah seseorang yang mengusahakan kapal untuk pelayaran di laut dengan melakukan sendiri pelayaran itu, ataupun menyuruh melakukannya oleh seorang nahkoda yang bekerja padanya. Pada lazimnya seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya dan tenaga atau modal yang sekecil-kecilnya. Dalam praktik sering terjadi pemilik kapal menyewakan kapalnya pada orang lain yang akan bertindak sebagai pengusaha kapal, atau dapat juga menjalankan sendiri kapalnya dan ia bertindak sebagai nahkoda.

f. Perusahaan

Perusahaan menurut Molengraaff tidak menekankan perusahaan sebagai sebuah badan usaha, melainkan hanya menyebutkan perusahaan sebagai sebuah kegiatan atau hanya terkhusus pada jenis usaha saja. Walaupun dalam pengertian tersebut telah memiliki aspek hukum perusahaan yaitu berupa perjanjian dengan pihak lain.

g. Minyak

Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak,

dan hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha, dan sejenisnya.

h. Tumpahan Minyak

Tumpahan minyak atau kebocoran minyak adalah sebuah peristiwa dimana bahan bakar cair hidrokarbon meluber ke lingkungan hidup, khususnya ekosistem laut.

i. Marine Pollution 73/78 (MARPOL 73/78)

Adalah sebuah peraturan internasional yang dibuat oleh lembaga internasional yang bernama Internasional Maritime Organization (IMO) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya Pencemaran lingkungan laut oleh kapal akibat dari aktifitas operasional di kapal ataupun kecelakaan kapal.

j. Sinergitas

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinergi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau tindakan bersama. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Sinergitas berkaitan dengan konsep dasar manajemen, sebab pada konsep dasar manajemen bersifat universal yang didefinisikan

dengan menggunakan kerangka berpikir keilmuan, mencakup kaidah-kaidah dan prinsip-prinsipnya.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah normatif yang bersifat yuridis normatif dengan menemukan kebenaran yang didasarkan dengan logika keilmuan hukum dari segi normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*).¹⁸

Menurut Bambang Sunggono penelitian yuridis normatif adalah, pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

¹⁷ Herujito, dan Yayat M., *Dasar-Dasar Manajemen*, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 44.

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2011, hlm. 57.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari studi kepustakaan berupa, peraturan perundang-undangan, literatur, majalah dan koran online, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan baik teori atau temuan lainnya, lalu dianalisa dan mengkritisi serta memberikan gagasan kritis dalam penelitian.

Untuk mendukung penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka, maka dibutuhkan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kesinambungan yang kuat dengan permasalahan yang diteliti, seperti:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kecelakaan Kapal di Indonesia.
 5. UNCLOS 1982.
 6. Marine Pollution 73/78 (MARPOL 73/78)
 7. Konvensi internasional lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap terjadinya pencemaran laut.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen tidak resmi yang didalamnya membahas dengan detail, segala hak yang telah diteliti oleh bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat dikatakan pula sebagai penunjang ataupun pendukung terhadap bahan hukum primer. Dalam penulisan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku dan jurnal hukum yang memiliki keterkaitan terhadap peratanggungjawaban perusahaan pemilik kapal terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak di laut.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan sekunder dalam hal memberikan pemahaman-pemahaman serta pengertian terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet yang berisikan tentang tanggungjawab pemilik kapal terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal miliknya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ahmad Tanzeh²⁰ dalam bukunya “Metodologi Penelitian Praktis, “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah penting yang digunakan untuk menghasilkan data pada penelitian, oleh karena itu dalam pengumpulan perlu diperhatikan kevalidan data tersebut”.

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 83.

Teknologi akuisisi data adalah langkah strategis penelitian, ketika pengumpulan data tidak berjalan dengan baik berakibat penelitian tidak membuahkan hasil yang maksimal. Karena tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan dengan memilah literatur hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan mendukung data sekunder.

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Tahapan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan penelusuran bahan pustaka, yaitu membaca literatur/buku berkaitan dengan pendapat ahli, dokumen,

jurnal, esai, serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan pada penulisan tesis ini yaitu deskriptif kualitatif adalah data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dituliskan atau dipaparkan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas berdasarkan hasil penelitian.

Analisa data merupakan proses yang tidak pernah selesai, dengan tujuan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja atau analisis data adalah proses menyusun mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.²¹ Analisa data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang menjadikan peraturan perundang-undangan, literatur atau sumber buku lainnya yang akan menjadi analisis untuk mengembangkan teori yang digunakan dalam memberikan titik terang terhadap permasalahan yang diteliti.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengemukakan suatu penjelasan mengenai suatu fenomena yang diteliti, penelitian hukum kualitatif menggunakan data sekunder sebagai data utama, hal ini dikarenakan dalam suatu penelitian yang meneliti suatu fenomena

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 66.

diperlukan pendekatan yang berawal dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli dan pemahaman peneliti berdasarkan pencarian atau pengalaman yang dilakukan lalu dikembangkan untuk memperoleh suatu pembenaran dalam bentuk dukungan data. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta tentang objek penelitian. fakta hukum di analisis dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat ahli untuk mencari jawaban atas masalah atau rumusan masalah yang di bahas.

F. Orsinalitas / Keaslian Penelitian

1) Nama : Berliana Damanik

Judul : Pertanggungjawaban dan Upaya Pemulihan
Pencemaran Laut di Wilayah Laut Timor
yang Bersumber dari Meledaknya Kilang
Minyak di Montara

Asal Kampus : Universitas Sumatera Utara

Tahun Penelitian : 2018

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional dan nasional terhadap pencemaran laut ?
2. Bagaimana upaya pemulihan lingkungan laut dalam hukum internasional ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban akibat tumpahan minyak di Montara ?

Hasil Penelitian :

1. Pengaturan hukum internasional tentang pencemaran laut yaitu
(1) Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Dumping) 1972, (2) International Convention for the Preventing of Pollution from Ships 1973/1978 (MARPOL 1973/1978), (3) The International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation (OPRC), (4) International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Civil Liability Convention) tahun 1969, (5) United National Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Sedangkan hukum nasional yang mengatur tentang pencemaran laut yaitu (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. (3) Perpres Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahnya Minyak di Laut.
2. Upaya pemulihan lingkungan laut dalam hukum internasional adalah apabila terjadi pencemaran lingkungan laut, maka langkah yang harus dilakukan dalam penanganan tumpahan minyak (oil spill) di laut adalah dengan cara melokalisasi

tumpahan minyak menggunakan pelampung pembatas (oil booms) yang kemudian akan ditransfer dengan perangkat pemompa (oil skimmers) ke sebuah fasilitas penerima reservoir baik dalam bentuk tangka ataupun balon, atau menggunakan beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tumpahan minyak diantaranya in-situ burning, penyisihan secara mekanisme, bioremediasi, penggunaan sorbent dan penggunaan bahan kimia dispersen. Namun setiap teknik ini memiliki laju penyisihan minyak berbeda dan hanya efektif pada kondisi tertentu. Hal ini juga diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 194 ayat 2 agar setiap negara menjaga lingkungan lautnya sendiri.

3. Pertanggungjawaban akibat tumpahan minyak di Montara adalah meskipun kilang minyak Montara tersebut merupakan milik dari Perusahaan Thailand PTTEP, akan tetapi apabila melihat pada prinsip 17 tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran minyak dilakukan dengan kata lain tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab yang bersifat absolut atau mutlak, seperti yang tertera dalam UNCLOS Pasal 139 yang menyatakan tanggung jawab untuk menjamin pentaatan dan kewajiban ganti rugi dan Pemerintah Australia mempunyai tanggung jawab atas pencemaran laut berdasarkan

Pasal 235 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi.

Penelitian ini melihat kepada aturan internasional dan nasional, sedangkan dalam penelitian penulis lebih didasarkan kepada aturan nasional saja, penelitian ini melihat kepada tanggung jawab pemerintah Australia terhadap pencemaran yang terjadi di Montara, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada tanggung jawab dan upaya perusahaan pemilik kapal dan pemerintah terhadap masalah pencemaran yang terjadi khususnya di Indonesia.

2) Nama : Lula Dhea Reinanda
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Jepang Terhadap Pencemaran Lintas Batas Akibat Tumpahan Minyak Kapal Kargo Di Laut Mauritius

Asal Kampus : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2021

Rumusan Masalah :

Bagaimana tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan minyak kapal kargo di Laut Mauritius ?

Hasil Penelitian:

Pemerintah Negara Jepang bertanggung jawab atas pencemaran lintas batas akibat kapal kargo dari perusahaan pelayaran Jepang

yang bocor dan menumpahkan minyak di Laut Mauritius. Adapun bentuk tanggung jawab yang dijanjikan oleh Pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas di Laut Mauritius adalah dengan memberikan kompensasi berupa bantuan ekonomi kepada Mauritius. Jepang sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kompensasi yang berupa pinjaman 30 miliar yen (\$289 juta) kepada Mauritius untuk membantunya pulih dari tumpahan minyak dan mengembangkan ekonominya. Secara terpisah, Jepang berencana memberikan 600 juta yen dalam bantuan hibah ke Mauritius untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana. Pada kenyataannya, tanggung jawab yang dijalankan oleh Jepang belum sesuai dengan aturan internasional karena sampai saat ini belum ada tindak lanjut maupun kabar terkait dengan bentuk tanggung jawab yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang yang berupa kompensasi kepada Mauritius. Seharusnya Jepang memberikan kompensasi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada Mauritius guna mengatasi pencemaran di Laut Mauritius.

Penelitian ini melihat kepada aturan internasional sedangkan dalam penelitian penulis lebih didasarkan kepada aturan nasional saja, penelitian ini melihat kepada tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap pencemaran yang terjadi di Mauritius, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada tanggung jawab dan upaya

perusahaan pemilik kapal dan pemerintah terhadap masalah pencemaran yang terjadi khususnya di Indonesia.

3) Nama : Haluanto Ginting

Judul : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana
Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan
Hidup

Asal Kampus : Universitas Medan Area

Tahun Penelitian : 2019

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana regulasi hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apa kendala penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn?

Hasil Penelitian :

1. Regulasi Hukum Pidana kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97- 120.

Ketentuan Pidana dalam UNDANG-UNDANG Nomor 32 tahun 2009 didasarkan pada asas ultimum remedium untuk pelanggaran Baku Mutu Lingkungan, Emisi dan Gangguan, sedangkan diluar pelanggaran tersebut berlaku asas Premium Remedium yaitu langsung bisa dikenakan sanksi pidana.

2. Penegakan hukum pidana bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara saat ini masih belum maksimal karena peran penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KIHK melalui Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Sumatera Utara masih mengedepankan tindakan preventif (pencegahan) daripada tindakan Represif (Penegakan hukum). Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya laporan pengaduan masyarakat dan data kasuskasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Balai Gakkum belum diselesaikan dengan maksimal.

3. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup dapat diklasifikasikan menjadi Hambatan yang bersifat alamiah, Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan., Mentalitas Para

penegak hukum belum baik dan profesional, dan Masalah pembiayaan.

Penelitian ini menitik beratkan pada sanksi, penerapan dan kendala penegkan hukum pidana terkait pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada tanggung jawab dan upaya perusahaan pemilik kapal dan pemerintah terhadap masalah pencemaran yang terjadi khususnya di Indonesia. Dengan demikian maka dapat penulis pastikan bahwa penulisan penulis tidak memiliki kesamaan dengan penulisan-penulisan terdahulu.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistem Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini, akan menguraikan Mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang merupakan pendukung dalam penelitian ini. Dalam Bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain tinjauan umum Pertanggung jawaban yang terdiri dari pengertian pertanggung jawaban, pertanggung jawaban hukum, Teori Pertanggung jawaban, tinjauan umum lingkungan, yang terdiri dari pengertian lingkungan, pengertian pencemaran, pencemaran

lingkungan laut, tinjauan umum perusahaan yang terdiri dari pengertian perusahaan, pemilik kapal

BAB III , Bab ini akan menjelaskan terkait rumusan masalah pertama, Tanggungjawab Perusahaan Pemilik Kapal Terhadap Tumpahan Minyak Dilaut Yang Mengakibatkan Pencemaran Di Laut.

BAB IV , Bab ini akan menjelaskan terkait rumusan masalah kedua, Sinergitas Perusahaan Pemilik Kapal Dan Pemerintah Dalam Menangani Masalah Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Di Laut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti, dalam kesimpulan tersebut pembaca dapat memahami secara mudah tentang permasalahan yang diteliti serta jawaban atas permasalahan tersebut, dalam bab ini akan berisikan kesimpulan terhadap pembahasan bab III dan bab IV serta Saran yang berisikan solusi terhadap kesimpulan bab III dan bab IV.